

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik* (Tim Redaksi Pustaka Setia (ed.); 1st ed.). CV Pustaka Setia.
- Anggara, S. (2015). *Metode Penelitian Administrasi* (B. A. Saebani (ed.); 1st ed.). Pustaka Setia.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.
- Ashady, S., & Hasan, A. (2021). Kebijakan Rumah Aman Bagi Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Fundamental Justice*, 2(1), 21–32. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v2i1.1295>
- Ashari, U. R., Yohana, H. I., Devi, A. L., & Rosyid, F. (2016). Optimalisasi Strategi Pemerintah Daerah Kota Batu Menuju Kota Layak Anak Melalui Perlindungan Hak-Hak Anak. *Jurnal Cakrawala*, 10(2), 181–192. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v10i2.42>
- Betah, M., Pangemanan, S., & Pangemanan, F. (2020). Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Manado). *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 1–10.
- Bhirawa, D. (2022). *Kasus Kekerasan Anak di Sidoarjo Tertinggi di Jatim*. Harianbhirawa. <https://www.harianbhirawa.co.id/kasus-kekerasan-anak-di-sidoarjo-tertinggi-di-jatim/>
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo. (2022). *Dinas P3AKB Gencarkan Kampanye Berlian di Sekolah-Sekolah*. <https://diskominfo.sidoarjokab.go.id/?page=v-berita&id=1644811944>
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. (2020). *DPRD Dorong Pemprov Bangun Shelter Rumah Aman Anak dan Perempuan Korban Kekerasan*. <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/dprd-dorong-pemprov-bangun-shelter-rumah-aman-anak-dan-perempuan-korban-kekerasan>
- Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo. (2021). *Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026*.
- DP3AKB Kabupaten Sidoarjo. (2022). *Kajian Akademik Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Sidoarjo*.

- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Fadilah, S., & Kurniawan, B. (2021). Implementasi Program JAMPERSAL (Jaminan Persalinan) Dalam Menjamin Persalinan Ibu dan Anak di Provinsi Jawa Timur. *Publika*, 9(4), 419–432.
- Febrianti, V. A. (2022). The Realization of a Child Friendly City through the Fulfillment of Children ' s Rights and Protection. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 17(1), 1–7. <https://doi.org/10.21070/ijppr.v17i0.1247>
- Haniah, H., & Bakhri, S. (2022). Sosialisasi, Aktualisasi dan Evaluasi Program Rutilahu di Kota Cirebon. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 94–106. <https://doi.org/10.24235/dimasejati.v4i1.10820>
- Hasyim Hasanah. (2013). Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 9(1), 159–178. <https://doi.org/10.21580/sa.v9i1.671>
- Herabudin. (2016). *Studi Kebijakan Pemerintah*. Pustaka Setia.
- Jatim.tribunnews.com. (2022). *Kasus Kekerasan Seksual di Sidoarjo Tinggi, Gus Muhdlor Launching Satgas PPA: Laporan jika Jadi Korban*. <https://jatim.tribunnews.com/2022/08/16/kasus-kekerasan-seksual-di-sidoarjo-tinggi-gus-muhdlor-launching-satgas-ppa-lapor-jika-jadi-korban>
- Jatimnow.com. (2022). *Miris, Angka Kekerasan Anak dan Perempuan di Sidoarjo Tembus 92 Kasus*. <https://jatimnow.com/baca-48855-miris-angka-kekerasan-anak-dan-perempuan-di-sidoarjo-tembus-92-kasus>
- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. (2022). *Dinas P3AKB bersama Penyuluh Agama Islam Non PNS Kec. Balongbendo Sosialisasikan Kampanye Berlian*. <https://kemenagsidoarjo.com/dinas-p3akb-bersama-penyuluh-agama-islam-non-pns-kec-balongbendo-sosialisasikan-kampanye-berlian/>
- Kemenppa.go.id. (2018). *Melindungi Hak Anak Dari Kekerasan*. <https://www.kemenppa.go.id/index.php/page/read/31/602/melindungi-hak-anak-dari-kekerasan>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). *Kabupaten/Kota Layak Anak, Bahan Advokasi Kebijakan KLA*. <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/09e6c-kla.pdf>
- Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2015). Laporan Akhir Reviu Implementasi Open Government Indonesia (2011-2014). *Direktorat Politik Dan Komunikasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS, OPEN GOVERNMENT INDONESIA*, 129.

- Kementerian PPN/Bappenas. (2017). *Tujuan 05. SDG's*.  
<https://www.sdg2030indonesia.org/page/13-tujuan-lima>No Title
- Kementerian PPPA. (2021). *Glosary Perlindungan Perempuan*.  
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/glosary/21/P>
- Kementerian PPPA. (2022a). *Korban Kekerasan Anak Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022*. Simfoni PPA. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Kementerian PPPA. (2022b). *Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 anak)*.  
<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo Nomor: 188/1/438.5.9/2023 Tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten S, (2023).
- Kompas.com. (2022). *Laporan Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir*. Kompas.Com.  
<https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/12435801/laporan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-meningkat-3-tahun>
- Kusumawati, M. P. (2019). Harmonisasi Antara Etika Publik Dan Kebijakan Publik. *Jurnal Yuridis*, 6(1), 1–23. <https://doi.org/10.35586/jyur.v6i1.794>
- Liputan6.com. (2022). *10 Daerah di Jawa Timur dengan Angka Kasus Kekerasan Tertinggi Terhadap Anak*. <https://surabaya.liputan6.com/read/4144379/10-daerah-di-jawa-timur-dengan-angka-kasus-kekerasan-tertinggi-terhadap-anak>
- LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). (2022). *Sekilas LPSK*.  
<https://lpsk.go.id/profil/sekilaslpsk>
- Maruf, M. (2019). Indonesia Response and Recent Development of Law and Policy in Addressing Marine Plastic Litter. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 4(2), 167–188.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v4i2.34757>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications Inc.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (40th ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*, 6(2), 195–224.  
<http://jurnalpolitik.uinsby.ac.id/index.php/jrp/article/view/90>
- Mulyadi, D. (2015). *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Alfabeta.

- Muni, A. (2020). Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia. *Al'Adalah*, 23(1), 65–78. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v23i1.27>
- Muthmainnah, S. (2021). Dukungan Sosial pada Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Studi pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jakarta. *Kajian Sosiologi Kontemporer*, 3(2), 236–256.
- Ningrum, O. W., & Hijri, Y. S. (2022). Implementasi Kebijakan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas (JIKA)*, 1(2), 109–125. <https://doi.org/10.30656/jika.v1i2.4180>
- Nugroho, R. (2018). *Public Policy* (Yulian Masda (ed.); 6th ed.). Elex Media Komputindo.
- Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo.
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Gerakan Budaya Literasi di Kabupaten Sidoarjo.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- Prabawati, I., Rahaju, T., & Kurniawan, B. (2020). *Analisis Kebijakan Publik*. Unesa University Press.
- Puspitasari, M., & Rodiyah, I. (2022). Keterlibatan Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Sidoarjo. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 169–179. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/8252>
- Ramadhani, A. S., & Widiyarta, A. (2021). The Effectiveness of the Department of Women Empowerment and Child Protection, Family Planning Sidoarjo District in Pressing Violence of Women and Children in Sidoarjo District. *DIA: Jurnal Administrasi Publik*, 19(1), 328–339. <https://doi.org/10.30996/dia.v19i1.5204>
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan

- Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Saputra, I. D., & Tukiman. (2021). Strategy For Handling Children Victims of Sexual Violence by DP5A City of Surabaya. *DIA: Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), 57–69. <https://doi.org/10.30996/dia.v19i2.5317>
- Setiawan, D. (2022). *Kasus Kekerasan Anak di Sidoarjo Tertinggi di Jatim*. Bhirawa Online. <https://www.harianbhirawa.co.id/kasus-kekerasan-anak-di-sidoarjo-tertinggi-di-jatim/>
- Sholichin, A. W. (2015). *Analisis Kebijakan (Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik)*. Bumi Aksara.
- Sidoarjonews.id. (2022). *Lewat Program Berlian, DP3AKB Sidoarjo Ajarkan Anak Mawas Diri Terhadap Kekerasan*. <https://sidoarjonews.id/lewat-program-berlian-dp3akb-sidoarjo-ajarkan-anak-mawas-diri-terhadap-kekerasan/>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). CV Alfabeta.
- Sumah, R. I. S., Lengkong, F. D. J., & Plangiten, N. N. (2020). Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Taman Kesatuan Bangsa Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 53(9), 48–54. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/28434>
- Surat Edaran Nomor: 733/1893/438.5.9/2022 Tentang Peningkatan Kepedulian Terhadap Upaya Perlindungan Anak, (2022).
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Alfabeta.
- Taufiqurakhman. (2014). *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan* (1st ed.). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers.
- Tukina. (2020). Sumber Daya Sektor Pelayanan Publik Era Revolusi Industri 4.0: Profesional dan Komunikatif Sebuah Tantangan. *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)*, 8(2), 103–112. <https://doi.org/10.33701/jmsda.v8i2.1404>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

- Wahid, A., & Irfan, M. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Refika Aditama.
- Wahyudi, M. I., & Ilham, T. (2021). Media Sosial untuk Penguatan Fungsi Pelayanan. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 1(2), 85–98. <https://doi.org/10.33701/cc.v1i2.1994>
- Waterman, E. A., Edwards, K. M., Makoni, E. I., Siller, L., Murphy, S. B., & Wagman, J. A. (2021). Zimbabwean Stakeholders' Perspectives on Causes of and Solutions to Gender-Based Violence in Their Community: Findings From a Focus Group. *Violence Against Women*, 27(6–7), 973–984. <https://doi.org/10.1177/1077801220917448>
- Wendra, R. (2016). Implikasi Tumpang Tindih Kewenangan Dalam Perizinan Usaha (Studi Kasus di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Tahun. *JOM FISIP: Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 1–12.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)* (T. Admojo;). CAPS.